



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, ada beberapa urusan yang perlu didukung dengan jabatan-jabatan tertentu dalam rangka untuk mendukung visi, misi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Analisis Kebutuhan Jabatan dengan memperhitungkan rasio keseimbangan antara Beban Kerja dan jumlah Jabatan Fungsional pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan Perubahan pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 10.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau;
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau;
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau ditambah satu angka sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Maret 2016

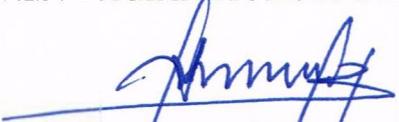
BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ttd
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 Maret 2016
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN (PERMENPAN DAN RB)	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	INSTANSI PEMBINA
1.	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Nomor 15 Tahun 2009	1) Sekretariat Daerah 2) Inspektorat Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri
2.	1) Pemeriksa Merek 2) Pemeriksa Paten 3) Perancang Peraturan Perundang-undangan	Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 47/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 1) Sekretariat Daerah 2) Sekretariat DPRD	Kementerian Hukum dan HAM
3.	1) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 2) Pemeriksa Pajak 3) Penyuluh Pajak	Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor PER 04/KEP/2/2006	Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah	Kementerian Keuangan
4.	1) Inspektur Ketenagalistrikan 2) Inspektur Tambang	Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/04/M.PAN/12/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kementerian Perindustrian
6.	1) Penguji Mutu Barang 2) Penera	Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/05/M.PAN/1/2005 Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/03/M.PAN/1/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kementerian Perdagangan

7.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Medik Veteriner 2) Paramedik Veteriner 3) Pengawas Benih Tanaman 4) Pengawas Bibit Ternak 5) Pengawas Mutu Hasil Pertanian 6) Pengawas Mutu Pakan 7) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 8) Penyuluh Pertanian 9) Analisis Pasar Hasil Pertanian 	<p>Nomor 52 Tahun 2012</p> <p>Nomor 53 Tahun 2012</p> <p>Nomor 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Jo. KEP/137/M.PAN/9/2004</p> <p>Nomor 2 Tahun 2011</p> <p>Nomor PER/17/M.PAN/4/2006</p> <p>Nomor 22 Tahun 2013</p> <p>Nomor PER/10/M.PAN/05/2008</p> <p>Nomor PER/02/M.PAN/2/2008</p> <p>Nomor 6 Tahun 2012 Jo. Nomor 23 Tahun 2013</p>	<p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>B P 4 K</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p>	Kementerian Pertanian
8.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyuluh Kehutanan 2) Polisi Kehutanan 3) Pengendali Ekosistem Hutan 	<p>Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002</p> <p>Nomor 11 Tahun 2011</p> <p>Nomor 50 Tahun 2012</p>	<p>B P 4 K</p> <p>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p>	Kementerian Kehutanan
9.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengendali Frekuensi Radio 2) Pengawas Keselamatan Pelayaran 3) Penguji Kendaraan Bermotor 	<p>Nomor KEP/51/M.PAN/4/2002 Jo. PER/27/M.PAN/11/2004</p> <p>Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004</p> <p>Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2011</p>	<p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p>	Kementerian Perhubungan
10.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 2) Pengawas Perikanan (penggabungan dengan Pengawas Benih Ikan) 3) Penyuluh Perikanan 4) Analisis Pasar Hasil Perikanan 	<p>Nomor 22 Tahun 2010</p> <p>Nomor 1 Tahun 2011</p> <p>Nomor PER/19/M.PAN/10/2008</p> <p>Nomor 25 Tahun 2013</p>	<p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>B P 4 K</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p>	Kementerian Kelautan dan Perikanan

11.	1) Pengawas Ketenagakerjaan 2) Instruktur 3) Mediator Hubungan Industrial 4) Pengantar Kerja 5) Penggerak Swadaya Masyarakat	Nomor 19 Tahun 2010 Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor PER /06/M.PAN/4/2009 Nomor 06/KEP/MK.WASPAN/2/2000 Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja
12.	1) Teknik Pengairan 2) Teknik Penyehatan Lingkungan 3) Teknik Jalan dan Jembatan 4) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 5) Penata Ruang	Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Nomor PER/10/M.PAN/6/2007	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum
13.	1) Administrator Kesehatan 2) Apoteker 3) Asisten Apoteker 4) Bidan 5) Dokter 6) Dokter Gigi 7) Epidemiologi Kesehatan 8) Entomolog Kesehatan	Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003 Nomor 07/KEP/MK.WASPAN/12/1999 Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	Kementerian Kesehatan

9) Fisioterapis	Nomor KEP/04/M.PAN11/2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
10) Fisikawan Medis	Nomor PER/12/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
11) Nutrisionis	Nomor 23/KEP/12/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
12) Okupasi Terapis	Nomor PER/123/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
13) Ortosis Protesis	Nomor PER/122/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
14) Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
15) Perawat	Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
16) Perawat Gigi	Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
17) Perekam Medis	Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
18) Pranata Laboratorium Kesehatan	Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
19) Psikolog Klinis	Nomor PER/11/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
20) Radiografer	Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
21) Refraksionis Optisien	Nomor PER/47/M.PAN/4/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
22) Sanitarian	Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
23) Teknik Elektromedis	Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah

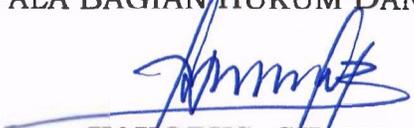
	24) Teknisi Gigi	Nomor PER/05/M.PAN/4/2007	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
	25) Terapis Transfusi Darah	Nomor PER/06/M.PAN/4/2007	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
	26) Terapis Wicara	Nomor PER/48/M.PAN/4/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
	27) Dokter Pendidik Klinis	Nomor PER/17/M.PAN/9/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
	28) Pembimbing Kesehatan Kerja	Nomor 13 Tahun 2013	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
14.	1) Guru 2) Penilik 3) Pamong Belajar 4) Pengawas Sekolah 5) Pengembangan Teknologi Pembelajaran 6) Pranata Laboratorium Pendidikan	Nomor 16 Tahun 2009 Nomor 14 Tahun 2010 Nomor 15 Tahun 2010 Nomor 21 Tahun 2010 Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 Nomor 3 Tahun 2010	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15.	1) Pekerja Sosial 2) Penyuluh Sosial	Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 Nomor PER/06/M.PAN/5/2008	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Sosial
16.	Pamong Budaya	Nomor PER/09/M.PAN/5/2008	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kementeran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17.	1) Adikara Siaran 2) Teknisi Siaran 3) Andalan Siaran 4) Pranata Humas	Nomor 130/M.PAN/1989 Nomor 128/M.PAN/1989 Nomor 129/M.PAN/1989 Nomor PER/109/M.PAN/11/2005	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika

18.	1) Pengendali Dampak Lingkungan	Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	Kementerian Lingkungan Hidup
	2) Pengawas Lingkungan Hidup	Nomor 39 Tahun 2011	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	
19.	Perencana	Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
20.	Analisis Kebijakan	Nomor 5 Tahun 2012	Sekretariat Daerah	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
21.	Arsiparis	Nomor PER/3/M.PAN/3/2009	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Arsip Nasional (ANRI)
22.	1) Analisis Kepegawaian	Nomor PER/36/M.PAN/11/2006	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
	2) Auditor Kepegawaian	Nomor 40 Tahun 2012	Badan Kepegawaian Daerah	
	3) Assessor SDM Aparatur	Nomor 41 Tahun 2012	Badan Kepegawaian Daerah	
23.	Pustakawan	Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Perpustakaan Nasional
24.	Pranata Komputer	Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah	Badan Pusat Statistik
25.	Penyuluh Keluarga Berencana	Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
26.	Surveyor Pemetaan	Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)
27.	Auditor	Nomor PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	Inspektorat	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
28.	Pengawas Obat dan Makanan	Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002	Dinas Kesehatan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
29.	Penerjemah	Nomor PER/124/M.PAN/5/2006	Sekretariat Daerah	Sekretariat Negara

30.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Nomor 77 Tahun 2012	Unit Layanan Pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
31.	Peneliti	Nomor KEP /128/M.PAN/9/2004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
32.	Perekayasa	Nomor PER/219/M.PAN/6/2008	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
33.	Penyuluh Hukum	Nomor 3 Tahun 2014	Sekretariat Daerah	Kementerian Hukum dan HAM
34.	Satpol PP	Nomor 4 Tahun 2014	Satuan Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri
35.	Widyaiswara	Nomor 14 Tahun 2009	Badan Kepegawaian Daerah	Lembaga Administrasi Negara (LAN)

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002